

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan yang diterima oleh negara Indonesia berawal dari beragam kawasan, baik diterima dari kawasan internal serta kawasan eksternal [1]. Suatu sumber penghasilan utama melalui kawasan domestik ialah pajak [1]. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dengan persentase terbesar, yaitu sekitar 80% dari total keseluruhan pendapatan negara [2]. Hampir semua daerah di Indonesia mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan untuk mendorong pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakatnya [3]. Pajak memegang kedudukan yang berpengaruh dalam perekonomian negara, karena pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan saja melainkan juga digunakan sebagai alat regulasi [3]. Kesadaran pajak di kalangan masyarakat sangat penting, karena pajak adalah pondasi dari hubungan saling ketergantungan antara negara dan masyarakat [4]. Pendapatan dalam suatu daerah didapatkan melalui PAD dihasilkan melalui pajak serta retribusi daerah yaitu hasil pengolahan kekayaan wilayah tersebut bisa dikatakan bersifat individual [5]. Pajak Daerah adalah asal utama pendapatan daerah yang wajib dibayar bagi tiap individu atau badan hukum yang diatur secara sah tanpa menerima imbalan langsung, dan dipungut [5]

Untuk menaikkan pendapatan suatu daerah, pemerintahan daerah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam bentuk regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendapatan daerah [6]. Salah satu bentuk kerja sama dilakukan dengan SAMSAT dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, mengingat banyaknya penduduk yang menggunakan kendaraan bermotor di daerah [6]. Berdasarkan faktor tersebut mendorong pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Badan

Pendapatan Daerah (Bapenda) berupaya lebih giat lagi meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak yang salah satunya sektor pajak kendaraan bermotor atau (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kewajiban masyarakat untuk patuh terhadap undang-undang perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik disebut sebagai kepatuhan pajak [7]. Kepatuhan ini sangat penting karena dapat memperoleh peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana peningkatan itu didapatkan dari pemungutan pajak kendaraan bermotor [7]. Kenaikan produksi kendaraan bermotor yang terus meningkat dalam negeri berdampak langsung berkelanjutan pada jumlah pemilik kendaraan bermotor yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor [7]. Pada semester I tahun 2023, Provinsi di Jawa Barat menerima pajak yang mencapai Rp 10,5 triliun atau dapat dikatakan setara dengan 48% [8]. Dimana sebelumnya ditetapkan target sejumlah Rp 21,9 triliun [8]. Sebagian besar penerimaan berasal dari PKB, berjumlah Rp 4,2 triliun [8].

Jumlah kendaraan bermotor beberapa tahun terakhir ini di Jawa Barat mengalami penambahan yang cukup signifikan, rata-rata berdasarkan tiap tahunnya nambah 15%-20% [9]. Penerimaan PKB sangat mendominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana partisipasinya mencapai 80% dari PAD [9]. Proyeksi penerimaan PKB cenderung memiliki peningkatan, namun walaupun terjadi peningkatan, belum seluruh potensi pajak kendaraan bermotor di Jabar terolah karena beragam kendala, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya [9]. Bapenda Provinsi Jawa Barat sukses dalam memperoleh target pendapatannya yang ditentukan sebesar Rp 32,7 triliun, di mana PKB adalah satu diantara lima pajak dikendalikan oleh pemerintah dan mengalokasikan sumbangan 40% besarnya terhadap PAD [10]. Selain itu, dalam menjunjung program perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Bapenda Jabar memberikan insentif berupa keringanan pembayaran denda dengan cara

dibebaskan, keringanan BBNKB II, keringanan pembayaran tunggakan PKB tahun ke-5, diskon PKB, dan diskon pembayaran BBNKB [10]

Tabel 1-1 Pendapatan PKB Jawa Barat 2018-2023



Sumber : diperoleh dari Bapenda Jabar olahan oleh penulis, 2024

Berdasarkan gambar 1 diatas terlihat jelas penerimaan pajak kendaraan bermotor tiap tahun menuju tahun berikutnya terus meningkat dan kenaikan didapatkan secara signifikan. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok pada tahun 2020 dimana penerimaan PKB tahun tersebut tidak mencapai level tahun sebelumnya melainkan di tahun 2020 adanya penurunan.

Meskipun penerimaan dari PKB mengalami kenaikan, masih terdapat masalah yang perlu diperhatikan, yaitu tingginya jumlah masyarakat yang menunggak membayar pajak. Pada tahun 2020, misalnya, dari sekitar 17 juta kendaraan bermotor di Jawa Barat, hanya 11 juta kendaraan yang telah membayar pajak [11]. Berbagai program telah direalisasikan, program yang dilaksanakan adalah program pemutihan pajak guna untuk meningkatkan pendapatan dari PKB serta terjadi kenaikan pendapatan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) [12]

Tabel 1-2. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Wilayah	Sepeda Motor	Mobil	Truck	Bus
---------	--------------	-------	-------	-----

Kabupaten Bogor	1.485.781	193.502	49.868	1.016
Kabupaten Sukabumi	332.072	44.781	20.764	478
Kabupaten Cianjur	422.844	41.747	19.490	639
Kabupaten Bandung	973.384	130.443	38.386	984
Kabupaten Garut	396.769	38.134	16.407	886
Kabupaten Tasikmalaya	294.016	24.100	11.336	649
Kabupaten Ciamis	248.580	24.733	11.538	867
Kabupaten Kuningan	313.328	29.525	9.079	569
Kabupaten Cirebon	670.694	58.368	25.006	1.336
Kabupaten Majalengka	627.236	26.137	12.145	853
Kabupaten Sumedang	2.769	26.735	9.910	361
Kabupaten Indramayu	481.853	39.598	17.656	783
Kabupaten Subang	408.232	34.308	12.734	453
Kabupaten Purwakarta	273.965	34.737	11.027	328
Kabupaten Karawang	755.534	100.847	30.751	1.405
Kabupaten Bekasi	1.258.080	233.260	61.401	3.545
Kabupaten Bandung Barat	554.116	72.948	21.730	518
Kabupaten Pangandaran	78.671	7.242	4.174	49
Kota Bogor	371.715	95.619	11.852	630
Kota Sukabumi	97.322	19.900	5.041	479
Kota Bandung	1.113.142	260.883	65.742	5.688
Kota Cirebon	130.647	30.460	12.363	418
Kota Bekasi	1.154.277	307.271	53.297	2.458
Kota Depok	955.647	200.304	19.699	738
Kota Cimahi	242.321	47.955	6.641	242
Kota Tasikmalaya	204.669	29.958	12.514	1.300
Kota Banjar	59.228	6.218	2.486	64

Sumber : diperoleh dari Bapenda Jabar

Salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Selanjutnya faktor kedua yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang diperoleh atas pemberian hak kepemilikan kendaraan bermotor yang terjadi karena perjanjian kesepakatan dua belah pihak atau tindakan sepihak dalam kondisi yang terjadi melalui jual beli, tukar menukar, hibah atau pemasukan kedalam badan usaha [13].

Adapun faktor ketiga yaitu Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah terbagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertera pada UU No. 28 Tahun 2009 yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu [14].

Tabel 1-3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun	Target	Realisasi
2018	Rp 45.267.605.170	Rp 49.176.487.699
2019	Rp 53.183.796.175	Rp 56.222.370.756
2020	Rp 34.551.610.670	Rp 40.220.203.478
2021	Rp 43.352.284.698	Rp 43.262.322.502
2022	Rp 35.567.775.778	Rp 44.837.616.240

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran data PPID Provinsi Jawa Barat

Dalam memprediksi faktor yang mampu mengimbaskan penerimaan PKB menggunakan regresi. Regresi linier berganda dapat melibatkan beberapa variabel independen dan dapat digunakan dalam mengevaluasi dampak dan bagaimana pengaruh aspek dari variabel X terhadap variabel Y [15]. Dalam Bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan *Multiple Linear Regression*.

Dalam penelitian ini saya akan mengamati lebih dari satu faktor variabel bebas dan mencari tahu keeratan relasi atau hubungan di antara faktor – faktor dalam penelitian ini. Untuk mengetahui bentuk hubungan di antara faktor-faktor tersebut

dapat digunakan analisis regresi yang juga biasa digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Dalam analisis regresi, bentuk hubungan di antara faktor – faktor tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan yang biasa disebut persamaan regresi. Persamaan regresi dapat ditentukan dari persebaran data pengamatan yang dibuat menjadi grafik plot untuk menghasilkan garis lurus (linear) atau dalam bentuk lengkung (non-linear) sebagai pendukung dari analisis regresi dapat ditentukan juga keeratan hubungan di antara faktor tersebut secara sendiri-sendiri [16]. Untuk mengetahui keeratan hubungan di antar faktor bebas tersebut, dapat digunakan koefisien korelasi[16].

Analisis regresi dan korelasi dikembangkan untuk mempelajari dan mengetahui pola hubungan antara dua variabel atau lebih [16]. Jika lebih dari dua variabel bebas, maka disebut regresi dan korelasi berganda [16]. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel - variabel bebas tersebut terhadap variabel tidak bebas. Nantinya hasil dari persamaannya juga dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel tidak bebas [16].

Pemilihan metode regresi linear sebagai metode prediksi pada penelitian ini dikarenakan kelebihanannya dalam menaksir parameter model yang sederhana. Selain itu, metode ini dapat melakukan analisis menggunakan lebih dari satu variabel bebas (X) sehingga dapat meningkatkan keakuratan prediksi[17].

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan

1. Untuk memahami pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Untuk memahami pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut :

1. Populasi serta sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, yaitu hanya menggunakan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk periode 2018-2023. Oleh karena itu masih belum mencakup mengenai PKB, BBNKB, dan Retribusi Daerah pada kabupaten dan kota di luar Provinsi Jawa Barat dan periode yang digunakan tidak kurang dan tidak lebih dari 2018-2023.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas variabel PKB, BBNKB, dan Retribusi Daerah. Sehingga penelitian ini dikhawatirkan belum mengkaji keseluruhan mengenai pendapatan asli daerah, dikarenakan masih banyak variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Penulis hanya menganalisis data laporan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat menggunakan Bahasa pemrograman Python dan perangkat lunak SPSS menggunakan metode *Multiple Linear Regression*.

1.5 Ruang Lingkup

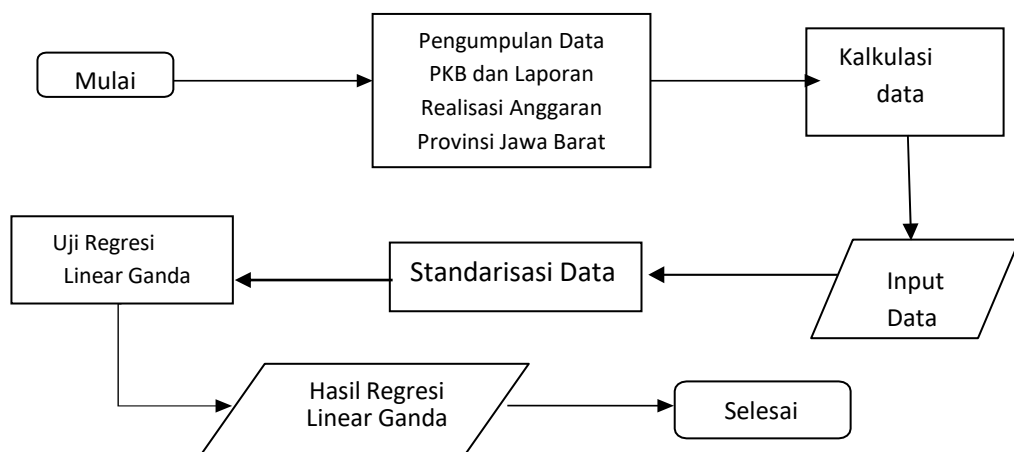
Agar pengerjaan tugas akhir ini menjadi lebih terarah dan mendapatkan hasil yang lebih spesifik, maka sistem yang dirancang dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Multiple Linear Regression*.

2. Sumber data yang digunakan berasal dari *website dataset* bapenda Jawa Barat dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jawa Barat.
3. Perangkat lunak yang digunakan adalah *Google Collab* dengan menggunakan bahasa pemrograman *Phyton* dan juga perangkat lunak SPSS.

1.6 Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi berupa data sekunder. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi melalui pengumpulan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jawa Barat. Dalam hal ini data yang digunakan adalah data berupa laporan pendapatan daerah Jawa Barat dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahunan yang digunakan untuk memprediksi persentase pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor. Analisis data pengelompokkan dalam penelitian ini menggunakan metode *Multiple Linear Regression* dengan jumlah cluster yang diinginkan 3 (tiga) cluster dengan bantuan bahasa pemograman *Phyton Colab* dan juga bantuan perangkat lunak SPSS. Alur penelitian dari analisis data dalam penelitian *Google Collab* adalah sebagai berikut.



Gambar 1- 1 Langkah-Langkah Analisis *Multiple Linear Regression* menggunakan *Google Collab*

Proses analisis *Multiple Linear Regression* dimulai dari pengumpulan data laporan keuangan pendapatan daerah Jawa Barat yang diambil dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jawa Barat, (2) melakukan perhitungan persentase PKB, BBNKB dan Retribusi Daerah, (3) melakukan input data, (4) melakukan pengujian data dan standarisasi data, (5) melakukan uji *Multiple Linear Regression* dari data yang sudah distandarisasi sehingga didapatkan hasil dari olah data dengan menggunakan *Multiple Linear Regression*.

1.7 Jadwal Pengerjaan

Berikut merupakan jadwal pengerjaan yang disesuaikan dengan metode analisis *Multiple Linear Regression*.

Tabel 1- 4 Jadwal Pengerjaan

Kegiatan	2023				2024					
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Pengumpulan Data dan Perhitungan Persentase										
Pengujian Data										
Analisis Data										
Dokumentasi										